



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT DEWAN PERS

Indonesia Terkoneksi : Makin Digital, Makin Maju

Jl. Kebon Sirih 32-34, 10110 Telp. (021) 3504874, 3504875, 3504877
Faks. (021) 3446575, www.dewanpers.or.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 55.01/PPK/Set-DP.31/SPMK/4/2024

Pengadaan Jasa Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ██████████
NIP : ██████████ 201403 2001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dewan Pers
Alamat : Gedung Dewan Pers Lt. 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34,
Jakarta 10110

disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 nomor 55.01.02/PPK/Set-DP.31/SP/5/2023 tanggal 19 April 2024 bersama ini memerintahkan:

II. Nama : PT Multi Utama Risetindo
Alamat : Jl. TB. Simatupang No.15 Rt 010 Rw 03 Tanjung Barat Jagakarsa
yang dalam hal ini diwakili oleh : ██████████

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dewan Pers
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

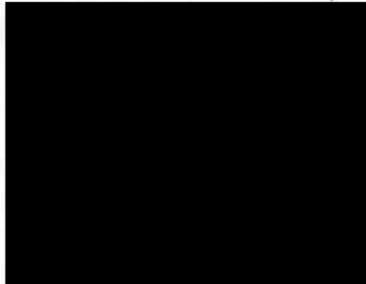
1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Taun 2024;
2. Tanggal mulai kerja : 19 April 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 September 2024;

5. Hasil Pekerjaan :

- 1) Laporan bersifat deskriptif dari pelaksanaan FGD di setiap provinsi yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers dari 3 lingkungan (politik, ekonomi dan hukum) secara terperinci
 - 2) Ringkasan eksekutif yang dilengkapi infografis dan narasi grafis dalam bentuk *soft copy* dan cetakan (*hard copy*) (bi-lingual dalam satu buku) disertai dg catatan rekomendasi untuk masing-masing provinsi.
 - 3) Laporan dalam bentuk *soft copy/dummy* siap cetak:
 - (i) Hasil Survei IKP Nasional 2024 ,
 - (ii) Hasil Survei IKP Provinsi 2024 dan
 - (iii) Lampiran data-data survei secara keseluruhan
6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 18 April 2024

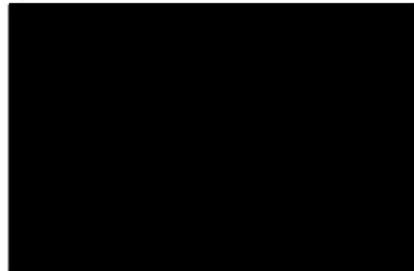
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Dewan Pers,



NIP. [REDACTED] 01403 2001



Menerima dan Menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
PT Multi Utama Risetindo



Direktur